

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASMAT

Hotman Toman Siringoringo, Akbar Silo, Agustina Ivonne Poli

Magister Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana

Universitas Cenderawasih

hotmantoman7@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan sistim pelayanan pada era globalisasi sangat terasa dan banyak mengalami perubahan. Pelayanan berbasis aplikasi telah mengubah pelayanan dari pelayanan manual menjadi pelayan berbasis teknologi. Secara khusus pelayanan kepegawaian yang semula secara manual tetapi kini telah berbasis Simpeg (sistim informasi manajemen kepegawaian). Simpeg memberikan kemudahan dalam pelayanan kepegawaian. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui pengamatan dan wawancara untuk mengetahui secara langsung bagaimana penerapan simpeg dalam pelayanan kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi simpeg Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat secara umum telah berjalan dengan baik. Pelayanan simpeg dapat dilihat dari dimensi transparansi, akuntabilitas, kondisional, kesamaan hak, keseimbangan Hak dan Kewajiban. Penerapan simpeg dalam pelayanan kepegawaian dapat memotivasi sehingga memberikan kemudahan akses data. Melalui akses data akan memberikan motivasi pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja ASN. Untuk menjaga stabilitas pelayanan dan kinerja diharapkan simpeg dapat mengikuti perkembangan zaman kemajuan zaman.

Kata kunci: Kualitas meningkatkan motivasi dan Kinerja

ABSTRACT

Changes in the service system in the era of globalization are felt and have undergone many changes. Application-based services have changed services from manual services to technology-based services. In particular, the personnel service, which was originally manual, has now been based on Simpeg (employment management information system). Simpeg provides convenience in personnel services. The research was conducted with a qualitative approach through observation and interviews to find out firsthand how SIMPEG is applied in personnel services. The results of the study indicate that the factors that affect the Civil Service and Human Resources Development Agency of Asmat Regency in general have been running well. Simpeg services can be seen from the dimensions of transparency, accountability, conditionality, equality of rights, balance of rights and obligations. The application of simpeg in personnel services can motivate so as to provide easy access to data. Through data access will provide service motivation so that it can improve ASN performance. To maintain service stability and performance, it is hoped that Simpeg can keep up with the times.

Keywords: Quality increases motivation and performance

I. Pendahuluan

Sistim informasi pada era globalisasi sangat penting dan dibutuhkan karena memberikan kemudahan dalam berbagai aspek pelayanan. Selain itu juga menyelesaikan pengolahan data secara cepat dan akurat. Pada era globalisasi saat ini dimana sistim informasi telah menjadi kebutuhan bahkan pemerintah telah memanfaatkan pelayanan berbasis aplikasi (Ibrahim & Maita, 2017). Perkembangan zaman yang sangat pesat dan ketat mejadikan dunia begitu dekat dan juga berdaya saing. Tidak kalah penting pemerintah daerah juga telah melakukan perubahan paradigma pelayanan Secara khusus Kabupaten Asmat juga memberikan pelayanan kepegawaian dari pelayanan berbasis manual dan pemanfaatan pelayanan berbasis aplikasi. Pelayanan kepegawaian berbasis aplikasai dalam hal ini menyangkut pelayanan dengan berbasis sistim informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) (Harihayati & Widianti, 2017). Sistem informasi sangat dibutuhkan oleh semua lini baik pemerintahan maupun sektor swasta. Hal ini terbukti dimana sistim informasi mampu meningkatkan pelayanan yang cepat dan memberikan kemudahan serta kepercayaan publik.

Badan Kepegawaian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat telah melaksanakan pelayanan kepegawaian dengan menggunakan Simpeg sebagai sarana pelayanan. yang memberikan kemudahan sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dirasan oleh publik. Keuntungan Simpeg pada umumnya menghasilkan kemudahan dalam melakukan rekapitulasi data PNS berdasarkan jabatan, pangkat/golongan, pendidikan, suku, eselon dan juga pelayanan kepegawaian lainnya. Simpeg memberikan solusi yang baik. Namun sebaliknya jika Simpeg mengalami masalah karena faktor usia sarana yang ada, atau jaringan simpeg bermasalah, hal ini dapat berdampak terhadap motivasi dan kinerja. Permasalahan serius yang timbul pada Simpeg harus segera diperbaiki sehingga aktivitas pelayanan dapat dipertahankan dengan baik. Permasalahan yang berlarut dan tidak direspon dengan cepat dapat merusak sistim pelayanan kepegawaian dan menghambat pelayanan publik.

II. Kajian Teori

Kajian yang dilakukan dalam penelitian diantaranya dapat dilakukan melalui peneltiam terdahulu. Penelitian terdahulu dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian karena dapat memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Selain rujukan penelitian terdahulu dapat dilakukan melalui teorri pendapat para ahli. Rujkan pendapat parah ahli dapat digunakan sebagai kerangka pikir. Dengan kerangka pikir akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, menghubungkan setiap bagian yang ada di dalam penelitian dan juga memberikan kemudahan kepada pembaca untuk memahami isi dari karya tulis ilmiah. Karya ilmiah menjadi mudah diperiksa karena adanya gambaran dari alur penelitian.

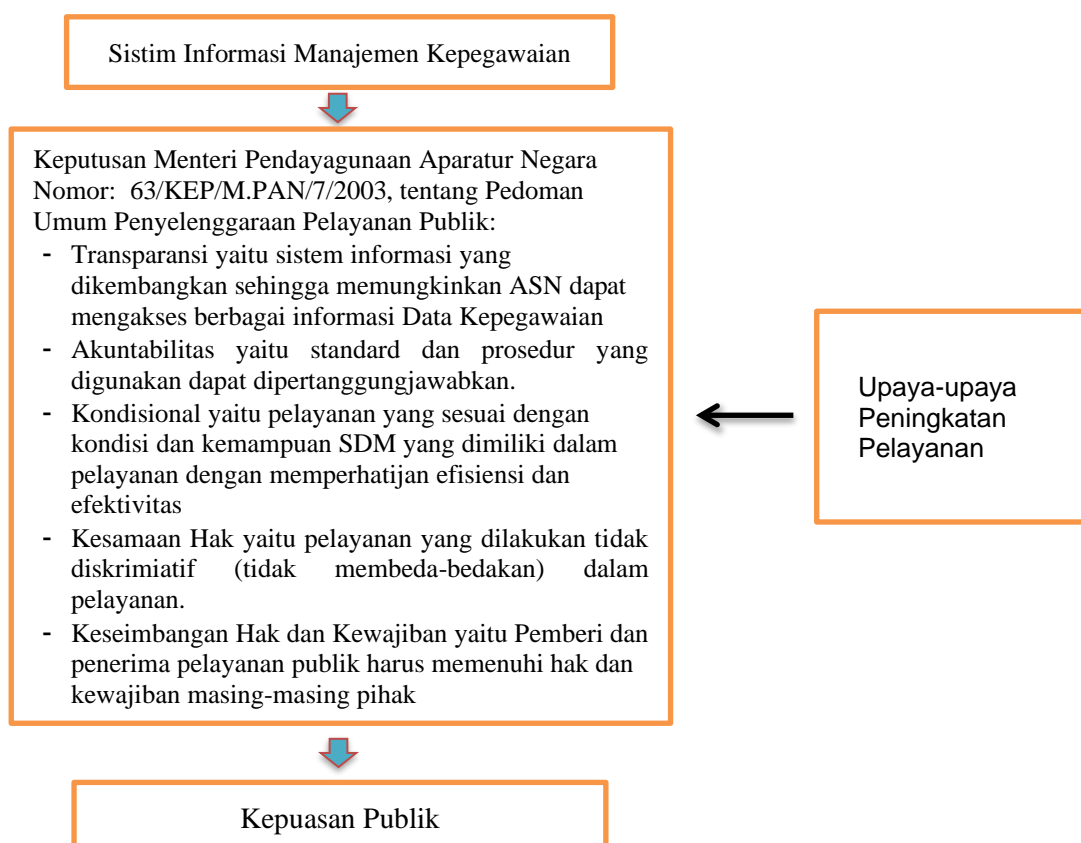
A. Pelayanan Publik

Pendapat Harbani Pasolong, 2008:128 mengatakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian dipertegas melalui Kualitas pelayanan masyarakat sering terjadi masalah sehingga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimana: asas-asas dalam pelayanan publik harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik. adapun asas-asas pelayanan publik dimaksud adalah, Transparansi; sifatnya terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, akuntabilitas; dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisional; dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas, partisipatif; mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat, kesamaan hak; tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, dan agama, golongan, gender dan status ekonomi, dan keseimbangan Hak dan Kewajiban; Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai dasar kerangka pikir penelitian seperti pada kerangka di bawah ini:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



Kerangka berpikir penelitian ini dirumuskan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung temuan-temuan sebelumnya.

III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan pengamatan dan wawancara yang mendalam. Pendekatan penelitian menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti (Noor, 2011:33) juga pendekatan kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada prinsip holistic yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci.

Moleong dalam Prastowo (2011:195) mengungkapkan bahwa subjek penelitian adalah informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang (lokasi atau tempat) penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono dalam Prastowo (2011: 197) memasuki situasi tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang yang dipandang tahu tentang situasi tersebut.

Adapun tujuan Penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai suatu hal menurut pandangan manusia. Penelitian kualitatif berhubungan dengan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Sedangkan Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *Human Instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono 2013;60). Dalam penelitian, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang bersumber dari wawancara maupun data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan judul.

IV. Pembahasan

A. Indikator Kualitas Pelayanan

Hasil penelitian penulis menguraikan apakah Simpeg di BKD di Kabupaten Asmat sudah berjalan dengan baik atau tidak, dapat diuraikan dengan indikator-indikator dari kualitas pelayanan antara lain:

1. Keterandalan (*Realibility*)

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan keterandalan adalah setiap ASN memiliki kemauan untuk melakukan pelayanan publik dengan memperhatikan ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas-tugas yang sedang dilaksanakan. Apabila target pelayanan sesuai dengan ketepatan waktu akan meningkat kepercayaan publik terhadap pelayanan Simpeg. Pelayanan publik yang dilakukan dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen kepegawaian harus memperhatikan kualitas dan kepercayaan publik.

Kemudian untuk menelusuri apakah indikator Keterandalan (*realibility*) yang digambarkan diatas telah berjalan dengan baik, maka untuk mengetahuinya, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian dan sekaligus pendapat-pendapat yang dikemukakan.

Berdasarkan hasil wawancara, sistim informasi manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik meskipun tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sebagaimana dengan pendapat ahli tentang pelayanan publik, dimana pendapat ahli Kotler mengatakan (dalam Supranto, 1994: 561) bahwa penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada indikator Keterandalan (*realibility*) adalah pelayanan kepegawaian yang dilakukan sesuai dengan kemauan yang dimiliki untuk melaksanakan pelayanan dengan memperhatikan ketepatan penyelesaian dan juga menjaga kepercayaan publik. Namun demikian, Operator Simpeg memiliki keterbatasan kemampuan dalam menangani permasalahan jaringan dan bahasa program computer. Keterbatasan kemampuan ini menjadi penghambat pada proses pelayanan artinya kecepatan yang diharapkan sebagaimana pada indikator kehandalan tidak optimal sebagaimana yang diharapkan.

2. Keresponsifan (*Responsiveness*)

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan keresponsifan (*responsiveness*) adalah kemampuan operator Simpeg untuk membantu pelayanan kepegawaian bagi ASN secara responsif sehingga mampu memberikan kemudahan pelayanan yang cepat tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan hasil wawancara, sistim informasi manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik dan sangat membutuhkan respons yang cepat dari para operator komputer Simpeg. Pelayanan responsive operator Simpeg harus dipertahankan untuk terjaganya pelayanan yang baik. Sebagaimana dengan pendapat ahli tentang pelayanan publik, dimana pendapat ahli Kotler mengatakan (dalam Supranto, 1994: 561) bahwa penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada indikator Keresponsifan (*responsiveness*) adalah kemampuan operator Simpeg memberikan pelayanan kepegawaian bagi ASN secara responsif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Keyakinan (*Confidence*)

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan keyakinan (*confidence*) adalah operator memiliki pengetahuan tentang kepegawaian sebagai penunjang utama didalam pelayanan kepegawaian dan hal ini sangat penting untuk melakukan proses olah data kepegawaian. Berdasarkan hasil wawancara, pelayanan Simpeg dapat berjalan dengan baik, terbangunnya komunikasi yang baik serta memberikan pelayanan yang baik serta memberikan pemahaman baik kepada ASN yang tidak memahami data yang dibutuhkan. Pelayanan kepegawaian telah berjalan dengan baik, memberikan pemahaman dan penjelasan kepada ASN yang kurang paham dengan data kepegawaiannya juga dilakukan komunikasi serah dalam arti membangun hubungan secara beretika sehingga saling menghargai satu sama lainnya. Sebagaimana dengan pendapat ahli tentang pelayanan publik, dimana pendapat ahli Kotler mengatakan (dalam Supranto, 1994: 561) bahwa penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada indikator Keyakinan (*confidence*) adalah kemampuan operator Simpeg memberikan pelayanan kepegawaian bagi ASN karena memiliki pengetahuan yang baik tentang data kepegawaian dan juga didukung etika komunikasi yang sangat baik.

4. Empati (*Empathy*)

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan empati (*empathy*) adalah operator memiliki kepedulian dengan memberikan perhatian secara pribadi bagi ASN ASN yang mengalami kesulitan dalam memahami permasalahan yang dihadapinya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas bahwa pelayanan Simpeg membutuhkan kesabaran dan motivasi dari pimpinan sehingga terjaganya kekompakan dalam pelayanan. Para operator Simpeg menjalankan tugas dan pelayanannya membutuhkan semangat dan dorongan dari dari pimpinan. Operator telah menunjukkan pelayanannya dimana memberikan kemudahan dan memberikan perhatian khusus bagi ASN yang tidak memahami tentang data kepegawaiannya. Sebagaimana dengan pendapat ahli tentang pelayanan publik, dimana pendapat ahli Kotler mengatakan (dalam Supranto, 1994: 561) bahwa penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada indikator Empati (*empathy*) adalah pelayanan yang dilakukan oleh operator Simpeg memberikan perhatian secara pribadi dalam arti pelayanan yang dilakukan tetap sesuai dengan waktu pelayanan kepegawaian.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan Publik Dalam Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

1. Transparansi (Akses Data)

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan transparansi adalah sistem informasi manajemen kepegawaian yang dikembangkan dapat dimungkinkan bagi ASN untuk mengakses berbagai informasi data kepegawaian. Berdasarkan hasil wawancara, sistim informasi manajemen kepegawaian dapat digunakan dengan baik dan membantu pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat. Sistim informasi manajemen kepegawaian dimaksud sangat membantu percepatan pelayanan kepegawaian. Sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya khususnya pada indikator transparansi yaitu sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan ASN dapat mengakses berbagai informasi data kepegawaian. Namun pelayanan transparansi sebagaimana dimungkinkan dapat di akses oleh ASN, namun belum dapat dilaksanakan yang disebabkan aplikasi yang digunakan belum terhubung dengan internet dan juga sistim informasi manajemen kepegawaian belum memiliki sistim jaringan yang sempurna sehingga dalam proses pengolahan data masih dibantu dengan pengolahan secara manual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanannya sistim informasi manajemen kepegawaian belum dapat dilaksanakan pelayanan melalui akses data karena belum terkoneksi dengan jaringan internet dan juga fitur-fitur yang dibutuhkan belum sempurna pada sistim informasi manajemen kepegawaian.

2. Akuntabilitas (Standard dan Prosedur)

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai standard dan prosedur yang digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat

memberikan kemudahan dan juga mengedepankan kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan dan prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem informasi manajemen kepegawaian telah berjalan dengan baik dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya pada indikator akuntabilitas yaitu pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur. Pelayanan yang dilakukan oleh Badan kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat telah memenuhi standar dan prosedur dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian. Pelayanan kepegawaian melalui standar dan prosedur yang dijalankan dapat meningkatkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dinyatakan ketika Bupati membutuhkan data dengan segera Badan Kepegawaian menindaklanjuti perintah pimpinan dan dilaporkan. Selain itu juga ketika BPKP Propinsi Papua meminta data kepegawaian juga segera disiapkan dan diserahkan pada saat sedang menjalankan tugas di Kabupaten Asmat. Pelayanan kepegawaian dengan memperhatikan standar dan prosedur sangat membantu dan menciptakan terbangunnya komunikasi yang sejalan serta kerja sama tim yang terkordinasi dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanannya sistem informasi manajemen kepegawaian dengan indikator akuntabilitas sudah baik dan perlu ditingkatkan agar pelayanan kepegawaian jauh lebih semakin bagus.

3. Kondisional (Kesesuaian Kondisi dan Kemampuan SDM)

Kondisional ini dapat diartikan bahwa pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat dan juga memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelayanan baik proses penginputan data, peremajaan data maupun pemutahiran data kepegawaian.

Berdasarkan hasil wawancara, pelayanan kepegawaian dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen kepegawaian memberikan kemudahan dan membantu pelayanan kepegawaian. Pemanfaatan sistem informasi manajemen kepegawaian memberikan kemudahan dalam proses awal (penginputan) data, pemutahiran data, peremajaan data maupun perekapan data. Semua proses ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan juga kondisi daripada sumber daya manusia itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya pada indikator Kondisional (sesuai dengan kondisi dan kemampuan sumber daya manusia) yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat.

Pelayanan kepegawaian yang dilakukan tidak ada unsur paksaan maupun tekanan. Tekanan dan paksaan akan mengakibatkan masalah dan menimbulkan buruk pelayanan dan juga tekanan psikologis yang berdampak terhadap kualitas pelayanan. Pelayanan yang dibangun oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat memberikan kebebasan berkreasi dan inovasi sehingga

terbangunnya kerja sama yang solid sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan terukur.

4. Kesamaan Hak (Tidak Diskrimiatif atau Tidak Membeda-bedakan)

Pelayanan data kepegawaian yang dilakukan oleh operator Simpeg tidak diskriminatif artinya memberikan pelayanan dengan cara tidak memilih-milih atau memperhatikan orang tertentu tetapi memberikan pelayanan kepada siapa tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Berdasarkan hasil wawancara, pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat telah menggunakan sistim informasi manajemen kepegawaian dengan memperhatikan kesamaan hak (tidak diskrimiatif atau tidak membeda-bedakan) siapa yang dilayani. Pelayan ini sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya pada indikator Kesamaan Hak adalah benar dilaksanakan dalam rangka pelayanan kepegawaian secara optimal dan berkeadilan.

Dalam pelayanan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat sudah sesuai dan perlu ditingkatkan pelayanannya secara berkeadilan, tidak diskriminatif dan objektif.

5. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Yang dimaksud dengan keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemberi dan penerima pelayanan publik bersama-sama memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelayanan yang dilakukan oleh operator simpeg menunjukkan pelayanan yang berkeadilan dalam arti pelayanannya memperhatikan hak-hak yang dilayani dan juga kewajiban memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian, kewajiban bersama antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan harus saling menghormati, melengkapi satu sama lain dan juga saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki.

Berdasarkan hasil wawancara, pelayanan sistim informasi manajemen kepegawaian dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban dapat terlaksana dengan baik meskipun menghadapi proses panjang yang disebabkan adanya oknum-oknum ASN yang tidak paham akan pentingnya validitas data masing-masing ASN. Pada proses yang panjang ini, petugas memberikan pemahaman terkait dampak yang timbul jika dokumen ASN tidak benar. Para operator selalu memberikan pemahaman bagi mereka yang selalu beranggapan tidak terjadi masalah baru. Melalui penyampaian pemahaman dan dipertegas membuat mereka mengerti. Dengan pengertian dan pemahaman yang mereka miliki menghasilkan pengertian yaitu memhami kewajibannya untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepegawaian. Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya pada indikator keseimbangan hak dan kewajiban adalah sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti kelengkapan yang dibutuhkan. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa pelayanan kepegawaian dilakukan dengan memperhatikan Keseimbangan Hak dan Kewajiban namun perlu ditingkatkan sehingga lebih baik.

V. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Tahap akhir pembahasan peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan kepegawaian Simpeg pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat, secara umum dapat berjalan dan membantu pelayanan meskipun belum optimal. Pelayanan ini tidak benar-benar optimal yang disebabkan komputer sering mengalami eror dan juga sistim jaringan Simpeg pada fitur-fitur jaringan Simpeg tidak optimal atau tidak tidak terkoneksi dengan baik. Hal ini menjadi penghambat dalam pelayanan kepegawaian.

Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan Publik Dalam Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah Transparansi (Akses Data); pelayanan transparansi sebagaimana dimungkinkan dapat di akses oleh ASN, namun belum dapat dilaksanakan yang disebabkan aplikasi yang digunakan belum terhubung dengan internet dan juga sistim informasi manajemen kepegawaian belum memiliki sistim jaringan yang sempurna sehingga dalam proses pengolahan data masih dibantu dengan pengolahan secara manual, akuntabilitas; pelayanannya sistim informasi manajemen kepegawaian dengan indikator akurabilitas sudah baik dan perlu ditingkatkan agar pelayanan kepegawaian jauh lebih semakin bagus, kondisional; pelayanan yang dibangun oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat memberikan kebebasan berkreasi dan inovasi sehingga terbangunnya kerja sama yang solid sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan terukur, kesamaan Hak (Tidak Diskrimiatif atau Tidak Membeda-bedakan); pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat sudah sesuai dan perlu ditingkatkan pelayanannya secara berkeadilan, tidak diskriminatif dan objektif, dan keseimbangan Hak dan Kewajiban; pelayanan kepegawaian dilakukan dengan memperhatikan Keseimbangan Hak dan Kewajiban namun perlu ditingkatkan sehingga lebih baik.

B. Saran

Pelayanan Kepegawaian Simpeg sangat penting dan membantu pelayanan kepegawaian. Pelayanan berbasis aplikasi sangat membantu penyelesaian tugas-tugas. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dan dukungan semua pihak untuk memberikan masukan yang membangun. Pada era saat ini, pelayanan berbasis aplikasi sangat berperan penting dalam membantu penyelesaian tugas-tugas baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat disarankan untuk memperkuat Simpeg sebagai sarana pelayanan untuk meningkatkan pelayanan dan agar memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada publik.

Daftar Pustaka

- Harihayati, T., & Widiyanti, U. D. (2017). Model Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di PT. XYZ. *SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE*, 5(1), 1-2.
- Ibrahim, W. H., & Maita, I. (2017). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 17-22.
- Noor, Jaliyanyah. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo, Andi. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam dalam Sinambela*. Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Supranto, J. (1994). *Metodologi Penelitian: Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 Tahun 2003 Tentang *Pelayanan Umum*